

## ABSTRAK

Bea meterai merupakan pajak atas dokumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen yang dikenai bea meterai berupa dokumen berbentuk tulis tangan, cetak dan elektronik. Salah satunya adalah dokumen elektronik yang menjadi perubahan atas bea meterai. Dokumen elektronik yang dibubuhi bea meterai dapat disebut *e-meterai*. Penelitian ini mengkaji tentang pengenaan bea meterai pada dokumen elektronik di Indonesia, sanksi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan sudut pandang Islam terhadap penerapan bea meterai pada dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengenaan bea meterai pada dokumen elektronik tersebut dikenakan atas dokumen berbentuk elektronik atau digital yang ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik dengan jenis dokumen yang terutang bea meterai. Sanksi yang dapat diberikan apabila melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai berupa sanksi administratif dan sanksi berupa pidana. Secara sudut pandang Islam, bea meterai dikaitkan dengan stempel nabi Muhammad SAW, akan tetapi hal tersebut sangat berbeda dengan tujuannya. Bea meterai merupakan pajak atas dokumen, pajak atau dalam islam disebut *dharibah* merupakan hal wajib bagi setiap warga negara atau wajib pajak untuk melaksanakan atau membayar pajak sesuai yang diatur dalam hukum Islam, dan hukumnya pun wajib bagi setiap warga negara dalam membayar pajak. Karena hal tersebut guna kepentingan kesejahteraan bersama dan untuk penerimaan pendapatan negara agar negara semakin maju dan makmur.

**Kata Kunci:** *Meterai, Elektronik, Dokumen*